

PERAN DINAS PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA BONTANG

Desy Ulandari¹, Iman Surya², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang. serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Bontang. Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Seksi Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Budidaya Perikanan, Masyarakat Nelayan serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mengetahui bagaimana Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sudah menjalankan perannya walaupun belum maksimal, dengan menjalankan program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan budidaya perikanan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan masyarakat perikanan meskipun masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan, serta memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana agar peran Dinas dalam pemberdayaan masyarakat pada masa yang akan datang lebih baik dan meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang.

Kata Kunci: *Peran, dinas, pemberdayaan, masyarakat, nelayan, Kota, Bontang*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ulanddessy@yahoo.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan individu dan masyarakat, yang mengalami impotensial – emosional dan sosial dalam menhghadapi masalah dan peningkatan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan adalah meningkatkan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi kebutuhan dan bertumpuh pada kemampuan dan perkembangan pada individu dan masyarakat yang bersangkutan.

Peningkatan produktifitas masyarakat nelayan tentu membutuhkan peran dan keterlibatan langsung dari pemerintah/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang modern di Kota Bontang dengan memberdayakan masyarakat nelayan secara optimal.

Kota Bontang yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Bontang diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa permasalahan internal dalam pemberdayaan masyarakat nelayan diantaranya masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia perikanan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, masih perlu meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat perikanan dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang bertanggung jawab, penurunan potensi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove) pencemaran limbah industri, keamanan pangan produk perikanan yang belum memenuhi persyaratan mutu, terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengelolaan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal, dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai jumlah aparat yang melayani dan pembinaan dalam usaha perikanan belum optimal, sebagian nelayan masih dikategorikan masyarakat kurang sejahtera karena nelayan melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional, kerusakan lingkungan dan bencana alam dampak dari perubahan iklim, penggunaan bahan dan alat tangkap yang dilarang seperti meracuni dan memancing menggunakan pukat harimau, harga penjualan pasar yang tidak stabil, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan, serta tidak meratanya bantuan yang di berikan.

Melihat kondisi diatas Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian sangat penting dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Bontang dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Bontang.

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Bontang sejak tahun 2016 telah berganti nama dari Dinas Kelautan dan Perikanan,

Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang, dalam peraturan ini juga memuat penggabungan berbagai instansi, perubahan dan penggabungan ini sesuai dengan kinerja instansi pemerintah tersebut maupun kondisi keuangan di Kota maupun Kabupaten, namun penggabungan berbagai instansi juga di karenakan ada penambahan urusan/bidang sehingga berubah fungsi serta permasalahan permasalahan kinerja yang kurang optimal, maka oleh itu instansi pemerintah diharapkan mengoptimalkan konerja organisasi maupun individu agar tercapai tujuan organisasinya,

Bedasarkan fonomena yang ada penulis tertarik melaukan penelitian Peran Dinas Perikanan, Ketahana Pangan, dan Pertanian Kota Bontang dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Riyadi (2002:138) dapat di artikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang maupun lingkungannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran di bagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok tersebut.
3. Peran pasif adalah sumbangan kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Menurut Veithzal Rivai (2003:148) peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku, peran kepemimpinan dapat diartikan kedudukannya sebagai seorang pemimpin.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah di sepakati bersama agar dapat di lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain makin tinggi kedudukan atau keberadan fungsi orang atau lembaga tersebut dalam masyarakat maka makin tinggi peranan dan pasti akan selalu dituntut partisipasinya sebagai kosekuensi dan tanggung jawab kehadiran orang atau lembaga tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Moh. Ali Aziz dkk (2005:169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antar subjek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial antar subjek dengan objek lain.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:75) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa “masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Payne dalam Adi (2003:54) mengemukakan bahwa: “Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan.

Masyarakat Nelayan

Menurut Kusnadi (2006), masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi

antara wilayah darat dan laut. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang dating setiap saat.
2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha.
3. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.
4. Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
5. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil dan
6. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai nilai utama pembangunan nasional.

Menurut Imron (2003) masyarakat nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi pantai.

Kondisi Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir

Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin di Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir dan pantai Indonesia merupakan tempat atau kantong-kantong kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan bukanlah suatu yang independent, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah laut darat (*continental orientation*) dan merupakan pembangunan wilayah laut (*maritime orientation*) sehingga menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor pinggiran (*peripheral*).

Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincoln Arsyad (1986;7) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bontang dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang”.

Adapun fokus penelitian yaitu :

1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang.
 - a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
 - b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
 - c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.
 - d. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bontang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bontang

Hasil Penelitian

Peran Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang ***Program Pengembangan Perikanan Tangkap***

Program pengembangan perikanan tangkap merupakan program yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Dinas hanya menjalankan program tersebut. Program pengembangan perikanan tangkap adalah program yang berisikan hal-hal yang bersangkutan langsung dengan nelayan baik itu memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana, pembinaan serta pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Program pengembangan perikanan tangkap oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian kepada Masyarakat Nelayan di Kota Bontang melalui tiga rencana kegiatan yakni yang pertama pembangunan fasilitas TPI/PPI Dinas turun kelapangan untuk memperbaiki TPI/PPI seperti perbaikan jembatan yang mulai rapuh/rusak, jadi ketika nelayan datang dari melaut sudah tersediannya keranjang ikan dan timbangan hasil laut dapat langsung di jual di TPI dan tidak perlu lagi ke pasar untuk menjual hasil tangkapannya konsumenpun langsung datang ke TPI atau PPI untuk membeli ikan yang masih segar dan murah.

Kedua pendampingan masyarakat nelayan Dinas sudah melakukan pendampingan kepada nelayan dengan turun langsung kelapangan menyurvei keadaan dan kondisi nelayan walaupun hanya 1 bulan sekali atau 5 bulan sekali karena tidak ada jadwal yang tetap dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Botang, pendampingan yang di lakukan Dinas seperti penyuluhan, pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan penyuluhan yang di berikan

adalah penyuluhan tentang cara menangkap ikan dengan benar, cara menjaga kesehatan saat di laut, cara memperbaiki mesin kapal. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat nelayan lebih paham saat dilaut.

Ketiga fasilitas bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat nelayan dalam menjalankan program pengembangan perikanan tangkap perlu adanya bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan seperti mesin kapal, kapal, alat tangkap, alat keselamatan karena Dinas mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakat nelayan dan memudahkan nelayan dalam ekonomi karena ada bantuan dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian.

Sarana dan Prasarana yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Masyarakat Nelayan dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap dari tahun 2012 berjumlah 206, di tahun 2013 berjumlah 2363, tahun 2014 berjumlah 2325, di tahun 2015 berjumlah 2251, dan di tahun 2016 berjumlah 2204, akan tetapi pada tahun 2016 jumlah bantuan dari dinas Kelautan dan Perikanan menurun yaitu berjumlah 2204 hal tersebut disebabkan karena Anggaran.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Budidaya Perikanan merupakan usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme lainnya seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiakan ikan serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan.

Program pengembangan budidaya perikanan menjalankan rencana kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Masyarakat Budidaya Perikanan
2. Pembinaan Pengembangan Perikanan
3. Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai

Dinas Perikanan sudah menjalankan program budidaya perikanan pertama pendampingan kepada masyarakat budidaya perikanan walaupun pendampingan tersebut hanya 3 bulan sekali karena Dinas tidak mempunyai jadwal yang tetap dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat budidaya perikanan. Pendampingan yang dilakukan Dinas Perikanan antara lain kegiatan pelatihan secara teknis, monitoring hama, penyakit dan obat-obatan

Kedua dalam menjalankan program pengembangan budidaya perikanan perlu adanya pembinaan kepada pembudidaya perikanan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian seperti kegiatan yang dilakukan Dinas memberikan bantuan sarana prasarana, pelatihan cara budidaya ikan yang baik,

sosialisasi, dan penyuluhan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan yang berkualitas berdaya saing baik dan untuk meningkatkan ekonomi pembudidaya perikanan, meringankan ekonomi masyarakat budidaya perikanan dengan memberikan bantuan-bantuan tersebut.

Sarana dan prasarana yang di berikan Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian untuk masyarakat budidaya perikanan dalam program pengembangan budidaya perikanan dari tahun ketahuan naik turun di karenakan mengikuti jumlah APBN yang di Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian yang sudah terlaksana tujuannya untuk memudahkan pembudidaya ikan dengan membeli bibit benih di BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) jadi tidak perlu lagi ke laut untuk mencari bibit ikan karena di BBIP sudah menyediakan bibit benih ikan.

Ketiga pengoperasiam BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) bagian dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian yang sudah terlaksana tujuan untuk memudahkan pembudidaya ikan dengan membeli bibit benih di BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) jadi tidak perlu lagi kelaut untuk mencari bibit ikan karena di BBIP sudah meyediakan bibit benih ikan.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegritas mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan alokasi sumber daya ikan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati seacara umum. Tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk menjaga kelestarian produksi, melalui rencana kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan
2. Optimalisasi Perizinan Usaha Perikanan
3. Pembinaan Usaha Perikanan (temu usaha pengusaha perikanan)

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian kepada Masyarakat nelayan di Kota Bontang melalui tiga rencana kegiatan yaitu yang pertama pembinaan hasil promosi perikanan yaitu dengan pembinaan pasca panen sebelum panen nelayan atau pembudidaya ikan mengusahakan bagaimana menciptakan produksi hasil panen yang berkualitas atau sesuai yang di ajarkan Pembina kususnya dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian itu sendiri. Dan dalam mempromosikan hasil perikanan Dinas juga membantu mempromosikan dengan mengekspor hasil perikanan ke luar kota atau ke luar pulau.

Kedua optimalisasi perizinan usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang di berikan Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat nelayan yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan

di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan laut lepas yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin pengangkutan ikan, dalam menjalankan program kegiatan Dinas sudah melakukan perizinan usaha perikanan untuk membantu para nelayan yang ada di Kota Bontang agar terbebas dari administrasi saat melaut.

Dinas sudah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dalam surat menyurat tentang perizinan kapal, izin usaha, izin penangkapan ikan dilaut walaupun yang dari tahun ketahun naik turun tetapi dinas sudah memberikan bantuan cukup baik kepada masyarakat nelayan.

Ketiga pembinaan usaha perikanan (temu usaha pengusaha perikanan) pembinaan Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan pembinaan usaha perikanan walupun belum maksimal karena hanya beberapa saja yang di bantu oleh Dinas dalam pembinaan usaha perikanan (temu usaha pengusaha perikanan) yaitu dengan melakukan kerjasama antara usaha dengan pengusaha perikanan agar meningkatkan pendapatan nelayan karena tidak hanya di Pasar saja mejual hasil produksi ikan tetapi dari perusahaan juga nelayan mendapatkan pengasilan yang lumayan.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan/nelayan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian kepada Masyarakat Nelayan di Kota Bontang melalui dua rencana kegiatan yaitu pertama peningkatan kopetensi petugas perikanan pihak Dinas pernah melakukan peningkatan kopetensi petugas perikanan dengan melakukan pengawasan tetapi seiring berjalannya waktu peningkatan kopetensi petugas perikanan di ambil alih oleh Provinsi jadi agak melemah tingkat pengawasannya karena dinas tidak berwenang lagi di dalam peningkatan kopetansi petugas perikanan jika nelayan melakukan pelanggaran Dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena laut di kuasai oleh Provinsi.

Kedua peran dinas dalam pemberdayaan masyarakat perikanan/nelayan yaitu sudah terlaksana walaupun belum maksimal karena Dinas sudah menjalankan program-program yang ada melalui visi dan misi, Dinas melakukan pendampingan pemninaan kepada masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pola pikir masyarakat nelayan seperti sosialisasi tentang cara menangkap ikan dengan benar, cara membudidaya ikan yang baik, dan Dinas membantu dalam perizinan kapal, memberikan fasilitas bantuan berupa sarana dan prasarana untuk meringkankan ekonomi masyarakat nelayan.

Dinas sudah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dalam surat menyurat tentang perizinan kapal, izin usaha, izin penangkapan ikan dilaut walaupun yang dari tahun ketahun naik turun tetapi dinas sudah memberikan bantuan cukup baik kepada masyarakat nelayan.

Faktor Pendukung Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Bontang adalah pertama Sumber Daya Manusia yaitu staf pegawai Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terjun langsung kelapangan untuk membina dan membimbing masyarakat nelayan di Kota Bontang. Kedua yaitu anggaran dalam menjalankan suatu program perlu adanya anggaran untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kota Bontang.

Ketiga sarana dan prasarana Dinas sudah memberikan bantuan berupa kapal, mesin kapal, alat tangkap, alat keselamatan, bibit benih kepada masyarakat nelayan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di Kota Bontang.

Keempat partisipasi masyarakat karena yaitu setiap pembangunan yang dilakukan melalui program-program tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi objek pembangunan karena partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program-program yang ingin di laksanakan akan gagal.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Bontang

Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Bontang yaitu pertama kualitas sumber daya manusia masih rendah karena tingkat pemahaman nelayan masih kurang jika Dinas melakukan pembinaan kepada masyarakat nelayan.

Kedua keterbatasan anggaran dalam menjalankan program-program anggaran merupakan salah satu yang penting karena jika tidak ada anggaran maka program-program yang ini di laksanakan akan gagal atau tidak berjalan.

Ketiga kondisi jika angin kencang dan ombak besar nelayan tidak dapat melaut karena kondisi cuaca yang tidak baik. Keempat harga ikan yang menurun karena banyak kapal nelayan yang masuk ke Kota Bontang untuk menjual hasil tangkapannya sehingga terjadinya saingan antara nelayan di kota Bontang dan nelayan di Luar Kota Bontang.

Kelima bantuan sarana dan prasarana yang di berikan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Pertanian sudah terlaksana tetapi bantuan tersebut belum merata karena masih ada masyarakat nelayan yang belum di berikan bantuan oleh Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Program pengembangan perikanan tangkap merupakan program yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Dinas hanya menjalankan program tersebut, program pengembangan perikanan tangkap berisikan hal-

hal yang bersangkutan langsung dengan nelayan dalam menjalankan program pengembangan perikanan tangkap terdapat tiga rencana kegiatan yaitu:

- a. Pembangunan fasilitas PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau TPI (Tempat Pendaratan Ikan). perbaikan jembatan yang mulai rapuh/rusak, memberikan bantuan timbangan full box dan keranjang ikan kepada nelayan di kota Bontang.
 - b. Pendampingan masyarakat nelayan Dinas sudah melakukan pendampingan kepada nelayan dengan turun langsung kelapangan menyurvei keadaan dan kondisi nelayan, pendampingan yang dilakukan Dinas yaitu penyuluhan, pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang hanya dilakukan 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali karena tidak ada jadwal yang tetap dari Dinas.
 - c. Fasilitas bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat nelayan dalam menjalankan program pengembangan perikanan tangkap Dinas sudah memberikan bantuan sarana kepada masyarakat nelayan yaitu kapal, mesin kapal, alat tangkap walupun belum merata sepenuhnya karena masih ada kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan.
2. Program pengembangan budidaya perikanan merupakan usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Program pengembangan budidaya perikanan menjalankan rencana kegiatan yaitu :
- a. Pendampingan Masyarakat Budidaya Perikanan, Dinas melakukan kegiatan yaitu pelatihan budidaya ikan, kegiatan secara teknis budidaya ikan, monitoring hama, penyakit dan obat-obatan agar hasil panen yang di dapatkan maksimal.
 - b. Pembinaan Pengembangan Perikanan, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas adalah memberikan bantuan sarana prasarana, Pelatihan. Bantuan sarana prasarana yang diberikan Dinas yaitu alat untuk membuat keramba ikan dan bibit benih ikan, bantuan yang diberikan Dinas Perikanan hanya satu kali satu tahun yang mengakibatkan keramba ikan rusak karena tidak layak pakai.
 - c. Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai merupakan bagian dari Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian yang sudah terlaksana, tujuannya untuk memudahkan pembudidaya ikan dengan membeli bibit benih di BBIP (Balai Benih Ikan Pantai).
3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegritas mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan alokasi sumber daya ikan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati secara umum. Tujuan utama pengelolaan

sumber daya ikan adalah untuk menjaga kelestarian produksi, melalui rencana kegiatan yaitu:

- a. Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan yaitu Dengan pembinaan pasca panen sebelum panen nelayan atau pembudidaya ikan mengusahakan bagaimana menciptakan produksi hasil panen yang berkualitas atau sesuai yang di ajarkan Pembina khususnya dari Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sendiri.
 - b. Optimalisasi Perizinan Usaha Perikanan merupakan salah satu layanan yang di berikan Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat nelayan yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan laut lepas yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin pengangkutan ikan, dalam menjalankan program kegiatan Dinas sudah melakukan perizinan usaha perikanan untuk membantu para nelayan yang ada di Kota Bontang agar nelayan terbebas dari administrasi saat melaut.
 - c. Pembinaan Usaha Perikanan (temu usaha pengusaha perikanan) Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan pembinaan usaha perikanan walupun belum maksimal karena hanya beberapa saja yang di bantu oleh Dinas dalam pembinaan usaha perikanan (temu usaha pengusaha perikanan) yaitu dengan melakukan kerjasama antara usaha dengan penangan.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Dalam program pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Kelautan dan Perikanan Dinas melaksanakan rencakan kegiatan yaitu:
- a. Peningkatan kopetensi petugas perikanan pihak Dinas pernah melakukan peningkatan kopetensi petugas perikanan dengan melakukan pengawasan tetapi seiring berjalannya waktu peningkatan kopetensi petugas perikanan di ambil alih oleh Provinsi tingkat pengawasan dinas melemah karena dinas tidak berwenang lagi di dalam peningkatan kopetensi petugas perikanan jika nelayan melakukan pelanggaran Dinas tidak bisa berbuat apa-apa karena laut di kuasai oleh Provinsi.
 - b. Pemberdayaan masyarakat perikanan/nelayan yaitu sudah terlaksana walaupun belum maksimal karena Dinas sudah menjalankan program-program yang ada melalui visi dan misi, Dinas melakukan pendampingan pembinaan kepada masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pola pikir masyarakat nelayan.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu salah satunya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) (staf pegawai)
2. Anggaran
3. Sarana dan peasarana, serta

4. Partisipasi masyarakat nelayan

Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat nelayan masih rendah yaitu tingkat pemahaman pola pikir dan keterampilan masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan masih ada yang melakukan pelanggaran saat melaut yaitu menggunakan pukat harimau untuk mengambil ikan dilaut, dan melakukan pengeboman untuk mengambil ikan dilaut yang mengakibatkan rusaknya trumbu karang.
2. Keterbatasan anggaran karena anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas tidak sebanyak tahun sebelumnya
3. Kondisi cuaca karena kondisi cuaca merupakan dari alam tidak bisa di pastikan oleh nelayan sehingga nelayan tidak dapat melaut di karenakan kondisi cuaca yang tidak baik.
4. Harga ikan yang menurun persaingan antara nelayan sesama kota ataupun luar kota karena ada nelayan yang diluar kota bontang menjual hasil tangkapannya di kota bontang yang mengakibatkan harga ikan yang menurun.
5. Sarana dan prasarana yang di berikan Dinas Perikanan adalah kapal, alat tangkap, mesin kapal, pelampung, drum, alat membuat keramba ikan, dan bibit benih ikan, tetapi bantuan tersebut belum merata karena masih ada Masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang belum mendapatkan bantuan sarana prasarana tersebut.

Saran

1. Pemerintah daerah Kota Bontang melalui Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan pertanian dalam menjalankan program yang ada sebaiknya melihat kondisi, kebutuhan nelayan karena masih ada masyarakat nelayan yang belum mendapatkan bantuan sarana prasarana, diharapkan Dinas memberikan bantuan dengan benar-benar melihat kondisi karena ada yang mendapatkan bantuan tetapi tidak lagi menjadi nelayan sehingga ada yang tidak mendapatkan bantuan baik kapal, mesin kapal, alat tangkap, dan kurangnya komunikasi antara nelayan dan pemerintah karena nelayan meminta sarana seperti kapal yang cocok untuk melaut tetapi yang di minta berbeda sehingga kapal tersebut tidak dapat di gunakan karena berbeda spesifikasinya antara kapal di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa.
2. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian diharapkan agar kegiatan pembinaan dan pembimbingan lebih sering dilakukan karena pembinaan yang dilakukan tidak ada jadwal yang tetap misalnya dinas hanya melaukan pembinaan 5 bulan sekali atau 3 bulan sekali.

Daftar Pustaka

- Adi Isbandi R. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Imron, Masyuri. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Presindo: Yogyakarta.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Levinso dan Soekanto. 2009. *Peranan*. Edisi Baru, Rajawali Pers: Jakarta, hal 213.
- Prayitno, Hadi & Lincoln Arsyad. 1986. *Petani Desa dan Miskin*. BPFE: Yogyakarta.
- Riyadi. 2002. *Rencana Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Soerjono soekanto. 2001. *Sosiologi suatu Pengantar*. Rajawali pers: Jakarta
- Suhendra, K. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hal 7 & hal 80.
- Veithzal, Rivai. 2003. *Menejemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. PT Remaja Rosada: Bandung.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.